

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memberikan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa, Pada tahun 2014, Pulau Jawa masih dominan dengan menyumbang 57,37% bagi perekonomian nasional, sedangkan sisanya dari luar Jawa menyumbang sebesar 42,59%. Jawa Barat merupakan provinsi yang berada pada peringkat ke-3 sebagai salah satu provinsi yang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia yakni sebesar 12,95%. Jawa Barat berada di peringkat ke-3 setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Namun dari keseluruhan provinsi, pada tahun 2014 Provinsi Jawa Barat memiliki rasio belanja modal per kapita kabupaten dan kota se-Provinsi yang terendah yaitu sebesar Rp 0,271 juta (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik dan memilih Provinsi Jawa Barat untuk ditelaah karena provinsi tersebut merupakan provinsi yang rasio belanja modalnya terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Berikut daftar seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat yang tersaji dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1
Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bandung	15	Kabupaten Subang
2	Kabupaten Bandung Barat	16	Kabupaten Sukabumi
3	Kabupaten Bekasi	17	Kabupaten Sumedang
4	Kabupaten Bogor	18	Kabupaten Tasikmalaya
5	Kabupaten Ciamis	19	Kota Bandung
6	Kabupaten Cianjur	20	Kota Bekasi
7	Kabupaten Cirebon	21	Kota Bogor
8	Kabupaten Garut	22	Kota Cirebon
9	Kabupaten Indramayu	23	Kota Depok
10	Kabupaten Karawang	24	Kota Sukabumi
11	Kabupaten Kuningan	25	Kota Tasikmalaya
12	Kabupaten Majalengka	26	Kota Cimahi
13	Kabupaten Pangandaran	27	Kota Banjar
14	Kabupaten Purwakarta		

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pengadaan aset daerah sebagai investasi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk APBD yang pada prinsipnya alokasi belanja tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan publik terutama untuk daerah itu sendiri. Realisasi penyerapan belanja daerah termasuk belanja modal diukur oleh beberapa indikator variabel diantaranya belanja tanah, belanja peralatan dan

mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja asset tetap lainnya.

Menurut Pujoalwanto (2014:87) Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu (www.bi.go.id). Menurut Tambunan (2011:250-254) jika ekonomi sedang lemah, yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan PDB yang menurun atau negatif, maka Pemerintah berkewajiban sesuai fungsinya memberi insentif atau dorongan agar pertumbuhan kembali positif atau meningkat, untuk tujuan tersebut, Pemerintah lewat kebijakan fiskal mempunyai dua opsi yakni menaikkan pengeluaran atau mengurangi tarif pajak pendapatan. Artinya, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah saling mempengaruhi terutama pada saat pertumbuhan dari investasi dan ekspor sedang lesu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka belanja modal juga mengalami kenaikan.

Namun terdapat fenomena yang terjadi di Jawa Barat, pada periode 2011 hingga 2014 yang tersaji dalam tabel 1.2 berikut ini

Tabel 1.2

**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Realisasi Belanja Modal Jawa Barat
2011-2014**

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Realisasi Belanja Modal (%)
2011	6.48 %	74.54%
2012	6.21%	86.84%
2013	6.06%	106.73%
2014	5.07%	111.36%

Sumber: www.bappeda.jabarprov.go.id (diolah)

Pada tabel 1.2 menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat yang mengalami perlambatan dari tahun 2011 sampai 2014. Pada Tahun 2012

LPE melambat dibandingkan dengan tahun 2011 dari 6,48% menjadi 6,21%. Perlambatan ini tidak lepas karena kinerja sektor pertanian yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 0,7%. Pada tahun 2013 melambatnya perekonomian tidak terlepas dari pertumbuhan konsumsi dan investasi yang tidak sekuat tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi ini mencakup berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa yang secara prinsip bertujuan untuk pengeluaran dalam melayani rumah tangga. Sedangkan investasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi dalam hal ini tidak hanya investasi fisik tetapi juga mencakup aset lancar dan pembelian tanah. Selain itu, melambatnya perekonomian pada tahun 2013 ini tercermin pula dari sisi sektoral dengan menurunnya kontribusi sektor bangunan dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2013. Lalu pada Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kembali mengalami perlambatan sebesar 5,07%, yang didorong oleh melemahnya konsumsi rumah tangga meskipun investasi dan konsumsi pemerintah meningkat. Sementara itu, di sisi lain pada periode 2011 hingga 2014 persentase realisasi belanja modal terhadap yang ditargetkan Jawa Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya (www.bappeda.jabarprov.go.id). Menurut BPS Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami peningkatan pos belanja sepanjang 2011-2014 berbeda-beda tergantung kebutuhan pembangunan di wilayahnya masing-masing karena kebutuhan pembangunan ini disesuaikan berdasarkan potensi wilayah, kegiatan produksi serta perkembangan masing-masing daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi oleh penurunan belanja modal. Dalam penelitian sebelumnya, Wertianti (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) dan Arwati (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan pada belanja modal.

APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun

anggaran. Penetapan prioritas-prioritas tersebut beserta upaya pencapaiannya merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, daerah harus memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. Dalam mendanai program atau kegiatan tersebut, terdapat dua sumber pendanaan utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber atau beberapa indikator antara lain pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan dari berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali potensi daerahnya secara maksimal agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerahnya sendiri melalui belanja modal, karena PAD mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya (www.djpk.kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika PAD naik, maka belanja modal pun mengalami kenaikan.

Menurut PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Artinya Pemerintah daerah harus memastikan kecukupan PAD dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah untuk mengalokasikan belanja modal. Namun terdapat permasalahan pada kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat pada periode penelitian yang tersaji dalam tabel 1.3 berikut ini

Tabel 1.3
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal (ribuan
Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2011	5,868,899,656.73	6,020,287,635.27
2012	7,909,533,925.00	9,685,250,878.00
2013	10,200,597,602.00	11,710,021,513.00
2014	14,071,981,881.22	12,498,764,012.19

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

(www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2011 belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar Rp 6,020,287,635.27 lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan yaitu sebesar Rp 5,868,899,656.73. Hal yang sama terjadi pada tahun 2012 dimana belanja modal sebesar Rp 9,685,250,878.00 lebih besar dibandingkan PAD yang dihasilkan yaitu sebesar Rp 7,909,533,925.00. Pada tahun 2013 pengeluaran belanja modal kabupaten/kota di Jawa Barat juga lebih besar yaitu Rp 11,710,021,513.00 dibandingkan PAD sebesar Rp 10,200,597,602.00 (www.bps.go.id).

Berdasarkan perbandingan PAD dengan belanja modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 sampai 2013 belanja modal yang dikeluarkan lebih besar dari pada PAD yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa PAD tidak bisa menutupi belanja modal, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih kurang dalam menghasilkan PAD sehingga dibutuhkan pembiayaan lain berupa dana perimbangan.

Dalam penelitian sebelumnya, Sugiarti dkk (2014) dan Arwati (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, berbeda dengan Wandira (2012) yang menyatakan bahwa diperoleh pengaruh negatif antara PAD dengan belanja modal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditemukan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka Peneliti tertarik untuk

mengkaji ulang dan melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal** (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat Periode 2011-2014)”.

1.3 Perumusan Masalah

Menurut BPS, pada tahun 2014 Jawa Barat merupakan provinsi penyumbang PDRB terbesar ketiga dibanding dengan provinsi lain. Namun pada periode 2011 hingga 2014 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan (www.bappeda.jabarprov.go.id). Sedangkan menurut BPS, pada periode yang sama belanja modal Pemerintah terus mengalami kenaikan seiring kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Faktor lain yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dari perumusan masalah yang sebelumnya dijelaskan, dapat muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2014?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal secara simultan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2014?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2014?
 - b. Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2014?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2014.
2. Menguji dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal secara simultan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2014.
3. Menguji dan mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2014.
 - b. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2014.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi di bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai belanja modal.

1.6.2 Aspek Praktis

Bagi Pemerintah

- a) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mengembangkan potensi kekayaan daerah masing-masing yang

akan meningkatkan PAD sehingga konsep otonomi daerah dapat terlaksana dengan tepat.

- b) Pemerintah Daerah dapat menurunkan tingkat ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat terutama dalam hal pendanaan.
- c) Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat membelanjakan anggarannya secara bijak dengan mempertimbangkan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan belanja modal sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen yang digunakan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan PAD. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh antarvariabel tersebut baik secara simultan maupun parsial.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Objek Penelitian yang dipilih adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dengan pengumpulan data sekunder berupa dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id). Pada situs tersebut terdapat LRA Permen dan LRA SAP. Menurut KSAP, LRA SAP menyesuaikan diri dengan perkembangan berbagai aturan terbaru penganggaran APBD, mencantumkan realisasi karena perubahan APBD tahun berjalan yang belum direncanakan dan dimasukkan dalam APBD. Sehingga format LRA lebih menyajikan secara detail mengenai pendapatan dan belanja daerah. (<http://www.ksap.org/>)

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2015 hingga Mei 2016. Periode objek penelitian adalah empat tahun, yaitu tahun 2011 sampai dengan 2014.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan penjelasan mengenai rangkuman teori mengenai pertumbuhan ekonomi, PAD, dan belanja modal. Dalam bab ini juga menampilkan kerangka pemikiran yang digunakan untuk

menggambarkan masalah penelitian yang akan mengantarkan pada kesimpulan penelitian, serta hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan secara kronologis dan sistematis tentang hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Setiap aspek pembahasan dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan diikuti oleh penarikan kesimpulan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini berisi tafsiran dan pemaknaan Peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran penelitian.